

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United States Agency for International Development (USAID) adalah salah satu badan yang mengkoordinir pembangunan internasional dan upaya kemanusiaan yang berfokus pada peningkatan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, misi USAID telah berkembang dari penekanan awal pada kebutuhan dasar manusia seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, hingga mendorong pasar bebas di tahun 1980-an, demokrasi dan keberlanjutan di tahun 1990-an, dan rekonstruksi setelah perang di tahun 2000-an (Sonderman et al., 2018:p1147). Program – program yang dijalankan oleh USAID sejak tahun 1990an hingga 2000an menunjukkan komitmen USAID dalam mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan internasional di berbagai sektor.

USAID merupakan lembaga utama pemerintah Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di berbagai bidang di seluruh dunia, antara lain: (1) pertanian dan ketahanan pangan; (2) demokrasi, hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan; (3) pertumbuhan ekonomi dan perdagangan; (4) pendidikan; (5) pengentasan kemiskinan ekstrim; (6) lingkungan hidup dan perubahan iklim global; (7) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (8) kesehatan global; (9) air dan sanitasi; (10) menangani krisis dan konflik; dan (11) inovasi

pembangunan global (Rahman & Giessen, 2017:p258). Dengan berbagai macam bidang yang dioperasikan oleh USAID, salah satu masalah utama yang berada pada Indonesia adalah tata kelola pemerintahan sesuai pada poin kedua.

Indonesia telah memperkuat tata kelola pemerintahan, respons, dan akuntabilitas lokal selama dua puluh tahun setelah desentralisasi. AS menawarkan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan dan layanan publik yang mengutamakan kepentingan umum (USAID, 2022:p1). Pembentukan keadaan yang adil, koheren, seimbang, dan setara dijamin oleh tata kelola yang baik, serta adanya kondisi seimbang di antara tiga komponen: pemerintah, pelaku sektor swasta, dan masyarakat sipil (Susanto Machmud et al., 2023:p841). Dengan adanya dukungan dari AS, Indonesia dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya keadaan yang adil, kohoren, seimbang dan setara. Melalui USAID, pemerintah AS memberikan dukungannya dengan meluncurkan program USAID ERAT.

USAID Tata Kelola PemERintahan yang Efektif, Efisien, dan KuAT (ERAT) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, USAID ERAT bekerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta koherensi dan implementasi kebijakan (USAID, 2022:p1). USAID ERAT telah mulai

melaksanakan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota selama periode pelaporan Oktober 2021–September 2022. Kegiatan ini akan membangun fondasi untuk koordinasi dan harmonisasi yang lebih baik antar-sektor dan antar-pemerintah, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik (USAID, 2022:pvii). USAID ERAT memfokuskan kerja samanya dengan enam provinsi dan 30 kabupaten/kota saja yang berada di Indonesia (USAID, 2022:p2).

Tulisan ini berfokus pada kerja sama USAID ERAT dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan lima kabupaten/kota di Provinsi tersebut (USAID, 2023:p1). Sebelum USAID ERAT menjalin kerja sama dengan pemerintah Sulawesi Selatan, perlu diidentifikasi permasalahan pada wilayah tersebut. Berdasarkan evaluasi dokumen laporan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang situasi umum daerah dan analisis masalah pembangunan, permasalahan utama adalah Provinsi tersebut belum berada pada keadaan ideal yang diinginkan serta diharapkan oleh masyarakatnya (Abdillah & Ahmadi, 2023:p46).

Untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif, sumber daya manusia harus memiliki kemampuan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tidak terlalu berbeda dari rata-rata nasional, tetapi masih dianggap rendah dan di bawah rata-rata nasional (Tahirs et al., 2023:p5). Melalui data dari RPJMD 2018-2023

Sulawesi Selatan, terdapat beberapa permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan pembangunan di Sulawesi Selatan. Masalah tersebut berupa perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan sosial, dan optimalisasi produktivitas serta daya saing produk sumber daya alam (Abdillah & Ahmadi, 2023:p46). Data RPJMD 2018-2023 menunjukkan banyaknya permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terdapat beberapa bentuk dukungan USAID ERAT terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan. Dukungan tersebut berupa pengembangan inovasi pelayanan publik, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan keterbukaan informasi publik, penguatan penanganan pengaduan masyarakat, peningkatan partisipasi swasta dan anak muda dalam pelayanan publik dan peningkatan kualitas anggaran daerah (USAID, 2023:p2). Per Juni 2023, USAID ERAT di Sulawesi Selatan telah menerbitkan tujuh dokumen kebijakan, menerapkan tujuh mekanisme koordinasi kebijakan daerah, 532 orang mendapat peningkatan kapasitas tentang tata kelola pemerintahan (45% diantaranya perempuan), dan 72 orang mendapat peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial (72% diantaranya perempuan) (USAID, 2023:p1). Perkembangan pencapaian USAID ERAT dalam mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terlihat dengan adanya penerbitan dokumen kebijakan, penerapan mekanisme

koordinasi kebijakan daerah dan meningkatnya kapasitas tentang tata kelola pemerintahan, kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Dengan adanya implementasi yang sebelumnya telah dilakukan, perlu diketahui apa peran USAID ERAT dalam kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan bagaimana peluang dan tantangan, serta dampak dari implementasi tersebut. Dengan demikian, penulis mengangkat judul penelitian “Peran USAID ERAT Program dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Sulawesi Selatan”.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada kerja sama yang dilakukan oleh AS-Indonesia yang termanifestasikan kedalam program USAID ERAT di Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penulisan ini adalah

- a. Bagaimana peran USAID ERAT dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan?
- b. Bagaimana dampak dari kerja sama yang dilakukan oleh USAID ERAT-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan dan manfaat penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

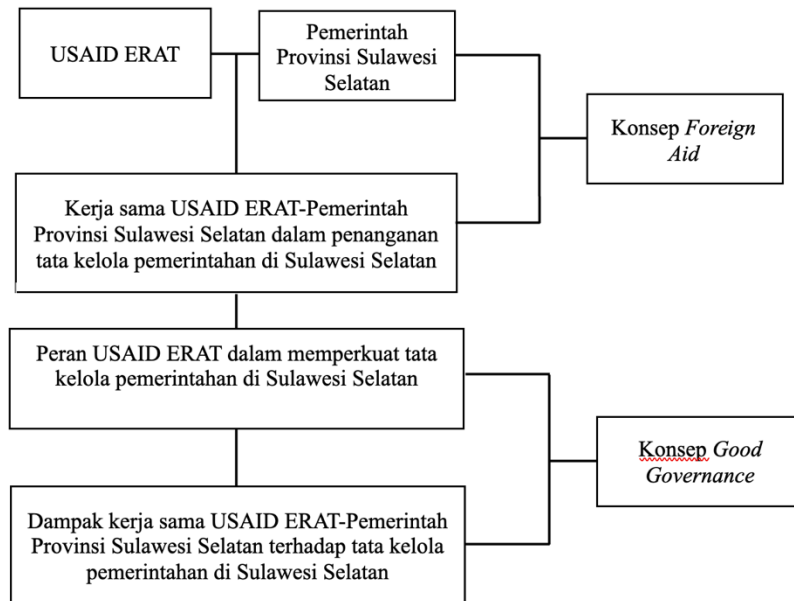
- a. Untuk menganalisis peran USAID ERAT dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.
- b. Untuk mengidentifikasi dampak kerja sama USAID ERAT-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Selain tujuan yang disebutkan sebelumnya, adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat umum dalam memahami bagaimana strategi kerja sama dan hambatan USAID dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.
- b. Diharapkan dapat memudahkan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

1.4 Kerangka Konseptual

Bagan 1. Kerangka Konseptual



Sumber: diolah oleh penulis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *Foreign Aid* dan konsep kerja sama internasional. Konsep *Foreign Aid* digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis kerja sama USAID ERAT-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Konsep *Good Governance* digunakan untuk menganalisis peran USAID ERAT pada kerja sama USAID ERAT-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan serta dampak kerja sama USAID ERAT-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Mengambil landasan dari kedua konsep tersebut, penelitian ini menguraikan apa saja peran USAID ERAT dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga mengulas strategi yang dilakukan oleh USAID ERAT dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upayanya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

a. Konsep Foreign Aid

Foreign Aid merupakan transfer sumber daya internasional yang diberikan secara sukarela oleh negara maju atau lembaga internasional kepada negara berkembang. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara penerima. Bantuan ini dapat berupa hibah atau pinjaman, dan mencakup berbagai bidang seperti militer, ekonomi, dan kemanusiaan. PBB menargetkan agar negara-negara maju memberikan setidaknya 0,7% dari pendapatan nasional mereka untuk bantuan ini (Zhukova, 2020:p72).

Menurut Lancaster & Dusen *Foreign Aid* adalah pemberian sumber daya publik secara sukarela dari satu pemerintah ke pemerintah lain, organisasi internasional, atau organisasi non-pemerintah (termasuk organisasi nirlaba yang menangani isu-isu tertentu, organisasi kepentingan publik, lembaga keagamaan dan afiliasinya, universitas, yayasan, bahkan perusahaan swasta yang bergerak di bidang nirlaba) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf

hidup dan mata pencaharian di negara penerima bantuan, serta berbagai tujuan lainnya (Lancaster & Dusen, 2005:p6). *Foreign Aid* diberikan oleh satu negara ke negara lainnya atau organisasi terkait, baik berupa uang, barang, atau jasa, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara penerima.

Bentuk *Foreign Aid* sangat beragam, mulai dari pemberian uang tunai langsung, pinjaman dengan syarat yang menguntungkan, hingga penghapusan utang negara penerima. Selain itu, bantuan juga bisa berbentuk barang seperti makanan atau obat-obatan. Penggunaan dana bantuan pun fleksibel, bisa untuk proyek infrastruktur, penelitian, pelatihan, atau bahkan sebagai insentif untuk menerapkan kebijakan tertentu sesuai keinginan negara donor (Lancaster & Dusen, 2005:p7). *Foreign Aid* bukan hanya sekadar transfer dana atau barang, tetapi juga merupakan alat yang kompleks dengan berbagai tujuan. Bentuk dan penggunaan bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi negara donor.

Keberhasilan bantuan dapat diukur dari dua hal utama. Pertama, seberapa besar bantuan tersebut mampu melindungi negara pemberi bantuan. Kedua, seberapa besar bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara penerima bantuan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan rata-rata per orang atau perbaikan kehidupan masyarakat miskin (Pomerantz,

2023:p3). Dengan kata lain, keberhasilan suatu program bantuan tidak hanya dilihat dari dampaknya terhadap negara penerima, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan negara pemberi. Suatu program bantuan dianggap sukses jika mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Bantuan pembangunan internasional terus memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan negara-negara berkembang. Meskipun demikian, evaluasi terhadap efektivitas bantuan terus dilakukan, dengan penekanan pada pentingnya akuntabilitas dan pencapaian hasil yang nyata. Dalam konteks keterbatasan sumber daya global, optimalisasi penggunaan bantuan menjadi semakin mendesak (Pomerantz, 2023:p4). Pernyataan di atas menekankan pentingnya bantuan internasional bagi negara berkembang, terutama dalam situasi krisis. Namun, seiring berjalannya waktu, tuntutan terhadap efektivitas bantuan semakin tinggi. Dunia kini menuntut agar setiap bantuan yang diberikan dapat memberikan hasil yang nyata dan dapat diukur.

Indonesia sebagai negara berkembang menjadi salah satu penerima bantuan internasional yang diberikan oleh Amerika Serikat. Bantuan diberikan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan USAID dalam program USAID ERAT. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana kerja

sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan USAID menggunakan konsep *Foreign Aid* dalam upayanya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

b. Konsep Good Governance

Secara umum, good governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik. Makna “baik” dalam konteks ini merujuk pada pengelolaan pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan kaidah serta prinsip-prinsip dasar good governance. Beberapa pandangan juga menafsirkan good governance sebagai bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi secara konkret, yang menuntut adanya civic culture sebagai penopang keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, istilah good governance sering dipahami sebagai praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Nurhidayat, 2023:p43).

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya mewujudkan good governance, diperlukan sinergi antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta (private sector), dan masyarakat sipil (civil society). Ketiga aktor tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya serta dalam pengaturan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut World Bank, good governance dipahami sebagai penyelenggaraan

manajemen pemerintahan yang solid dan akuntabel, yang didasarkan pada prinsip efisiensi pasar serta upaya pencegahan praktik korupsi, baik secara administratif maupun politis (Nurhidayat, 2023:p44-45).

Bank Dunia melihat tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pengelolaan sumber daya dan urusan suatu negara secara terbuka, transparan, adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain tata kelola pemerintahan tidak 'baik' jika hanya melayani 'publik', tetapi akan menjadi 'tata kelola pemerintahan yang baik' jika melayani kepentingan kelompok yang terpinggirkan dan lemah (Singh, 2023:p42). Dalam pandangan ini, pemerintahan yang baik berarti memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses politik dan sosial.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis masalah penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, memahami, dan memahami situasi, peristiwa, dan fenomena dalam lingkungan alamiahnya (Ezer & Aksüt, 2021:p16). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mengkaji bagaimana upaya dari USAID ERAT dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi

Selatan melalui kerja samanya dengan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang dikumpulkan oleh penulis dalam bentuk kalimat, kata, dan gambar yang mendukung penjelasan tentang topik yang dibahas.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh lembaga atau organisasi penelitian sebelumnya. Data sekunder berkaitan dengan informasi dari masa lalu. (Ajayi, 2017:p2). Data sekunder merupakan informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, seperti dari publikasi pemerintah dan artikel jurnal.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi kajian literatur. Sumber pengumpulan data sekunder adalah publikasi pemerintah, situs web, buku, artikel jurnal, catatan internal, dan sebagainya (Ajayi, 2017: p2). Dalam mengumpulkan data sekunder, data diperoleh melalui kajian literatur. Penulis mencari informasi dari buku, jurnal, dokumen resmi, situs web, dan media elektronik lainnya yang memiliki integritas dan akuntabilitas.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menjelaskan hasil dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data sekunder yang telah diperoleh, kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan deskriptif sebagai hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Governance

Menurut UNDP, tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai “pelaksana otoritas publik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan urusan negara disemua tingkatan”. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu proses yang rumit di antara berbagai lapisan masyarakat dan kelompok, di mana mereka harus mengadopsi dan menengahi perbedaan yang ada sambil tetap mematuhi aturan dan kewajiban hukum. Proses ini rumit karena mencakup tiga dimensi: politik, ekonomi, dan administrasi (Ramzy et al., 2019:p131). Tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah proses yang sederhana, melainkan sebuah dinamika yang kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai lapisan masyarakat dan kelompok kepentingan. Dalam proses ini, semua pihak dituntut untuk mampu mengakomodasi dan menengahi perbedaan pandangan, nilai, dan kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Upaya ini harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu dan lembaga.

Tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya telah diterapkan sejak awal peradaban manusia, ketika hubungan antarindividu mulai terbentuk dan mereka harus melewati fase-fase perkembangan berpikir rasional demi mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat (Rahim, 2019:p133). Ketika manusia mulai hidup dalam kelompok dan komunitas,

mereka dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan, keyakinan, dan nilai. Dalam proses ini, muncul kesadaran akan pentingnya pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan bersama, serta perlunya sistem yang menjamin keberlangsungan hidup bersama.

Pada awalnya, tata kelola pemerintahan yang baik tidak diukur berdasarkan indikator seperti akuntabilitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, supremasi hukum, maupun partisipasi publik, melainkan lebih difokuskan pada proses demokratisasi dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Pada awal tahun 1980-an, kondisi ekonomi yang buruk di negara-negara dunia ketiga mencerminkan masalah struktural yang mendalam, sehingga Bank Dunia mendorong pemberian bantuan ekonomi melalui penerapan rencana dan strategi pembangunan. Namun, kemudian disadari bahwa meskipun bantuan ekonomi penting, hal itu tidak cukup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut, karena adanya masalah mendalam dalam aspek politik, sosial, dan budaya yang turut memperburuk tata kelola pemerintahan (Rahim, 2019:p134). Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang kompleksitas tata kelola, situasi ekonomi yang buruk di negara-negara dunia ketiga pada tahun 1980-an menunjukkan bahwa masalah yang lebih mendalam, terutama yang terkait dengan struktur politik, sosial, dan budaya, turut mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Bank Dunia, yang awalnya memprioritaskan bantuan ekonomi untuk pembangunan, mulai

menyadari bahwa bantuan tersebut tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Bank Dunia melihat tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pengelolaan sumber daya dan urusan suatu negara secara terbuka, transparan, adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain tata kelola pemerintahan tidak 'baik' jika hanya melayani 'publik', tetapi akan menjadi 'tata kelola pemerintahan yang baik' jika melayani kepentingan kelompok yang terpinggirkan dan lemah (Singh, 2023:p42). Dalam pandangan ini, pemerintahan yang baik berarti memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses politik dan sosial. Oleh karena itu, tata kelola yang baik harus memastikan bahwa kebijakan dan program tidak hanya menguntungkan kelompok dominan, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi mereka yang terpinggirkan, sehingga tercipta keadilan sosial yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dianggap sebagai atribut tata kelola pemerintahan yang baik. Negara saja tidak dapat menjamin pelaksanaan yang efektif dari semua persyaratan ini. Dalam hal ini, masyarakat sipil dan sektor swasta memiliki peran yang sangat besar untuk mendukung pemerintah negara. (Ramzy et al., 2019:p131). Tidak bisa dipungkiri bahwa negara saja seringkali tidak dapat menjamin pelaksanaan yang efektif dari semua persyaratan ini tanpa adanya dukungan eksternal.

2.2 Konsep Foreign Aid

Selama ini, *foreign aid* (bantuan luar negeri) telah menjadi sarana utama dalam mendorong pembangunan di negara lain. Istilah "*foreign aid*" memiliki makna yang bervariasi tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Bagi sebagian orang, *foreign aid* dipandang sebagai bentuk kebijakan. Sementara itu, ada pula yang melihatnya sebagai pemindahan sumber daya publik ke negara lain. Di sisi lain, ada yang mengartikannya sebagai aliran sumber daya yang secara khusus ditujukan untuk memberikan dukungan kepada pihak penerima bantuan (Lancaster & Dusen, 2005:p6). Beragamnya sudut pandang ini mencerminkan kompleksitas konsep *foreign aid* serta menunjukkan bahwa makna dan tujuannya tidak selalu bersifat seragam atau netral.

Dalam pandangan Morgenthau, *foreign aid* merupakan pemenuhan kewajiban dari beberapa negara kaya terhadap banyak negara miskin (Morgenthau, 2012:p301). Berdasarkan pandangan Morgenthau, negara-negara kaya, dengan sumber daya yang lebih besar memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada negara miskin yang menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemajuan. Sedangkan menurut Lancaster, *foreign aid* merupakan pemberian sumber daya, baik berupa dana, keahlian, maupun teknologi dari suatu negara atau lembaga internasional kepada negara lain untuk tujuan pembangunan ekonomi, sosial, atau kelembagaan (Lancaster, 2007:p9). Dengan demikian, *foreign aid* pada hakikatnya dipahami tidak hanya sebagai instrumen solidaritas moral negara maju terhadap negara berkembang,

tetapi juga sebagai sarana transfer sumber daya yang bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan kelembagaan di negara penerima.

Bantuan umumnya dipahami sebagai dukungan resmi yang disalurkan kepada negara atau organisasi dengan syarat yang ringan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang tergolong miskin (Pomerantz, 2023:p6). *Foreign aid* kerap dianggap sebagai alat penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pandangan ini biasanya berdasarkan pada teori-teori yang menyatakan bahwa negara-negara terbelakang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yaitu situasi di mana kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat tabungan dan investasi saat ini, yang kemudian berdampak pada minimnya investasi di masa mendatang. Akibatnya kondisi kemiskinan terus berlanjut dan memperparah keadaan, menciptakan siklus yang sulit diputus (Asatullaeva et al., 2021:p1). Dengan demikian, *foreign aid* dipandang sebagai intervensi yang diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan yang dialami oleh negara-negara berkembang, sekaligus sebagai sarana strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Terdapat enam kategori utama *foreign aid* yang dapat diidentifikasi, yang semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu adanya transfer uang, barang, atau jasa dari satu negara ke negara lain. Enam jenis bantuan tersebut meliputi bantuan kemanusiaan, bantuan untuk kebutuhan dasar (subsisten), bantuan

militer, bantuan yang bertujuan meningkatkan prestise, serta bantuan yang ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Dari semua jenis bantuan tersebut, hanya bantuan luar negeri kemanusiaan yang tidak bersifat politis. Meskipun bantuan kemanusiaan bersifat nonpolitis, bantuan tersebut dapat menjalankan fungsi politik ketika beroperasi dalam konteks politik. Bantuan asing yang disalurkan oleh organisasi swasta tetap akan dikaitkan dengan citra pemerintah negara asalnya, terutama jika bantuan kemanusiaan tersebut diakui oleh pemerintah atau masyarakat negara penerima sebagai alat yang menjalankan fungsi politik. (Morgenthau, 2012:p301). Bantuan kemanusiaan yang secara prinsip bersifat netral tidak sepenuhnya lepas dari dimensi politik, terutama ketika diberikan dalam konteks yang sensitif. Baik bantuan yang disalurkan langsung oleh negara maupun melalui organisasi swasta, tetap dapat dipersepsikan sebagai perpanjangan dari kepentingan negara donor.

Foreign aid dapat disalurkan dalam berbagai bentuk, seperti hibah tunai, pinjaman dengan bunga rendah, penghapusan atau pengurangan utang, maupun dalam bentuk barang seperti pangan dan obat-obatan. Bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan infrastruktur seperti jalan. Selain itu, bantuan juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penelitian, memberikan dukungan teknis, serta menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat di negara penerima. Tak jarang, bantuan juga diberikan sebagai bentuk dorongan agar negara penerima menerapkan kebijakan tertentu yang sejalan dengan kepentingan atau tujuan

negara donor (Lancaster & Dusen, 2005:p7). *Foreign aid* memiliki bentuk dan fungsi yang beragam, tidak hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis bagi negara donor dalam memengaruhi kebijakan negara penerima.

Bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, teknis, dan militer dalam lanskap internasional dimulai setelah Perang Dunia II. Konsep *foreign aid* mencakup upaya utama dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau layanan medis guna menyelamatkan nyawa saat terjadi konflik, krisis, atau bencana alam (Akhmetova, 2022:p67). Pemulihan Eropa yang berlangsung relatif cepat berkat aliran dana besar dari Marshall Plan dan berbagai sumber lainnya, turut meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap konsep bantuan luar negeri (Pomerantz, 2023:p11). Pasca Perang Dunia II, banyak negara mengalami dampak yang besar dan menyebabkan pembangunan kembali sulit untuk dilakukan oleh negara itu sendiri. Dalam situasi tersebut, *foreign aid* muncul sebagai salah satu opsi untuk membantu negara-negara yang terdampak kembali bangkit. Keberhasilan pemulihan Eropa yang relatif cepat melalui bantuan eksternal, seperti Marshall Plan, menjadi bukti konkret efektivitas *foreign aid* dalam mendukung rekonstruksi dan pembangunan pascakonflik.

Era setelah Perang Dunia II menandai terjadinya perubahan signifikan dalam tatanan pemerintahan global. Negara-negara baru mulai bermunculan di berbagai belahan dunia, dimulai dari kawasan Timur Tengah dan Asia,

kemudian diikuti oleh gelombang kemerdekaan negara-negara Afrika pada tahun 1960-an. Walaupun terdapat beberapa pengecualian, mayoritas negara yang baru merdeka belum sepenuhnya siap untuk mengelola pemerintahan sendiri. Selain harus membentuk sistem hukum dan politik yang baru serta mendirikan lembaga-lembaga yang sesuai, pemerintahan yang baru juga memikul tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya (Pomerantz, 2023:p11-13). Periode pasca Perang Dunia II tidak hanya menjadi momentum lahirnya negara-negara baru, tetapi juga membuka tantangan besar bagi pemerintahan yang baru terbentuk, yang harus membangun fondasi negara dari awal sambil memastikan kesejahteraan rakyat di tengah keterbatasan kapasitas dan sumber daya.

Dalam praktik *foreign aid* saat ini, GNI per kapita menjadi indikator yang paling umum digunakan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara sistem klasifikasi yang digunakan oleh PBB dan Bank Dunia, negara-negara penerima bantuan umumnya tergolong dalam kategori berpenghasilan rendah dan menengah (Pomerantz, 2023:p35). Negara-negara yang tergolong dalam kategori berpenghasilan rendah dan menengah, biasanya mengalami kesulitan dalam pembangunan negaranya. Dengan adanya klasifikasi, membantu donor untuk menentukan negara-negara yang paling membutuhkan bantuan bantuan eksternal untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan.

Terdapat tiga prasangka yang saling berkaitan erat dan sering muncul dalam berbagai narasi mengenai intervensi bantuan:

- a. Prasangka pertama, yang mungkin paling menonjol dan dikenal sebagai “Prasangka tentang Kebaikan”, mencerminkan pandangan umum yang hanya menganggap intervensi dalam bentuk bantuan kemanusiaan atau kerja sama pembangunan sebagai bentuk bantuan yang benar-benar otentik atau tulus.
- b. Prasangka kedua, yang dikenal sebagai “Prasangka tentang Kebutuhan”, menggambarkan pandangan yang cenderung mengaitkan bantuan secara hampir eksklusif dengan kondisi-kondisi kebutuhan mendesak yang dianggap membenarkan intervensi, terutama jika situasi tersebut memenuhi kriteria urgensi tertentu.
- c. Prasangka ketiga, yang dikenal sebagai “Prasangka tentang Penerima Bantuan”, memiliki keterkaitan erat dengan prasangka tentang kebutuhan. Prasangka ini mencerminkan kecenderungan dominannya narasi dan pemahaman mengenai bantuan yang dibentuk dari perspektif pihak penerima. Karena pihak penerima bantuan lebih sering menjadi objek kajian dibandingkan dengan pihak pemberi, maka wacana yang berkembang pun sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh bentuk intervensi konkret yang mereka terima sebagai respons terhadap situasi kebutuhan yang mereka alami (Pellicciari, 2022:p17).

Ketiga prasangka ini memiliki perbedaan terhadap alasan pemberian bantuan akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep *foreign aid* tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan dari negara maju kepada negara berkembang, tetapi juga mencakup proses transfer pengetahuan, teknologi, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya praktik bantuan internasional, muncul prinsip *aid effectiveness* sebagai panduan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi negara penerima. Prinsip ini, sebagaimana dijelaskan dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness*, menekankan lima pilar utama yaitu *ownership* yang menegaskan pentingnya negara penerima untuk memiliki dan mengelola sendiri kebijakan pembangunan, *alignment* yang mendorong donor agar menyesuaikan bantuan dengan prioritas dan lembaga nasional, *harmonization* yang menekankan koordinasi antar donor agar tidak terjadi tumpang tindih, *managing for results* yang menekankan fokus pada capaian nyata dan manfaat bagi masyarakat, dan *mutual accountability* antara donor dan penerima untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana (Magfira, 2023:p16-17). Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, bantuan luar negeri diharapkan tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan memperkuat kemandirian dan kemampuan negara penerima dalam mengelola

pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai *aid effectiveness* menjadi penting sebagai dasar dalam menilai sejauh mana suatu kerja sama pembangunan, termasuk program USAID ERAT, dapat dikatakan efektif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengacu pada berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja peran USAID ERAT dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi dampak kerja sama USAID ERAT dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upayanya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Berikut adalah beberapa literatur yang dijadikan acuan dalam penulisan ini, yang memberikan dasar teoritis serta wawasan mendalam mengenai isu-isu terkait.

Tabel 1: Penelitian Sebelumnya

<u>Judul Penelitian</u>	<u>Penulis</u>	<u>Tahun</u>	<u>Fokus Penelitian</u>
Tata kelola berkelanjutan: Studi tentang idealitas model tata kelola daerah Sulawesi Selatan, Indonesia	Abdillah, Zahra Ahmadi	2022	Penelitian ini berfokus pada model tata kelola daerah yang ideal di Sulawesi Selatan, dengan fokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan tata kelola di daerah tersebut.
<i>Back to School Movement in the Context of Nonformal Education: A Planetary Social Pedagogy Approach</i>	Ila Rosmilawati, Herlina Siregar, Moh. Fikri Tanzil Mutaqin	2024	Penelitian ini berfokus pada program pendidikan nasional dalam hal ini program USAID ERAT dalam pemberantasan anak putus sekolah. Untuk memsukkseskan program wajib belajar 12 tahun, USAID ERAT hadir sebagai fasilitator pemda dengan pihak swasta.
<i>Network Governance Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Lamongan</i>	Himatul Awaliyah Putri, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati	2024	Penelitian ini berfokus pada program USAID ERAT dalam pencegahan pernikahan dini. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan bekerja sama USAID ERAT dalam pelaksanaannya.

Sumber: Abdillah & Ahmadi, 2023; Putri et al., 2022; Rosmilawati et al., 2025

Penelitian pertama berbentuk jurnal artikel dengan judul “Tata kelola berkelanjutan: Studi tentang idealitas model tata kelola daerah Sulawesi Selatan, Indonesia” yang ditulis oleh Abdillah dan Zahra Ahmadi pada tahun 2022. Penelitian ini membahas pada dua aspek utama. Pertama, model tata kelola daerah yang ideal di Sulawesi Selatan, dengan fokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Aspek kedua, membahas

tentang tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan tata kelola di daerah tersebut.

Penelitian kedua berbentuk jurnal artikel dengan judul "*Back to School Movement in the Context of Nonformal Education: A Planetary Social Pedagogy Approach*" yang ditulis oleh Ila Rosmilawati, Herlina Siregar, dan Moh. Fikri Tanzil Mutaqin pada tahun 2024. Penelitian ini membahas mengenai masalah pendidikan nasional dalam hal ini program USAID ERAT dalam pemberantasan anak putus sekolah. Dalam program ini USAID ERAT hadir sebagai fasilitator pemda dengan pihak swasta dalam program wajib belajar 12 tahun.

Penelitian ketiga berbentuk jurnal artikel dengan judul "*Network Government dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak di kabupaten Lamongan*" yang ditulis oleh Himatul Awaliyah Putri, dan Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawatipada tahun 2024. Penelitian ini membahas Penelitian ini berfokus pada program USAID ERAT dalam pencegahan pernikahan dini. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan bekerja sama USAID ERAT dalam menangani terjadinya pernikahan dini.

Ketiga penelitian ini, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian pertama, berfokus pada tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022, sedangkan penulis berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Penelitian Kedua, berfokus pada program dan peran USAID ERAT dalam pemberantasan anak putus

sekolah, sedangkan penulis berfokus pada program dan peran USAID ERAT dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Penelitian ketiga, berfokus pada program USAID ERAT dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, sedangkan penulis berfokus pada program USAID ERAT dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.